

SKRIPSI

**PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM
PROSES PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN MELALUI
APLIKASI SMART DUKCAPIL**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

AL KHORIREZKI

1710112102

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



DOSEN PEMBIMBING

Dr. ANTON ROSARI S.H, M.H. (PEMBIMBING I)

DARNIS, S..H., M.H. (PEMBIMBING II)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PROSES PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN MELALUI APLIKASI SMART DUKCAPIL

(Al Khoriz Rezki, 1710112102, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Halaman, Tahun 2022)

ABSTRAK

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Administrasi Kependudukan di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri masih rendahnya cakupan kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemennya. Padahal akurasi dan elemen data terbaru tersebut di kartu keluarga itu sangatlah penting. Ini bersangkutan juga untuk arah pembangunan daerah ke depannya, juga bagi pemilik data juga penting. Dalam hal pendaftaran kependudukan serta perubahan data kependudukan itu diminta juga peran aktif dari masyarakat serta kejujuran masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota juga menemukan masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada penduduk pendatang, baik dari luar kabupaten maupun warga asing dan masih rendahnya cakupan akta Pencatatan Sipil. Angka jumlah penduduk yang rentan administrasi kependudukan juga masih tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dari data kependudukan tidak diperbaharui baru ini adalah tidak tepat sasaran bantuan sosial masyarakat yang dikeluarkan pemerintah pusat. Maka dari itu untuk memudahkan masyarakat yang merubah administrasi kependudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat inovasi dengan aplikasi Smart Dukcapil yaitu aplikasi pelayanan secara daring semua kegiatan Pencatatan Sipil. Jadi masyarakat tidak perlu datang lagi ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan data kependudukan.

Kata Kunci : Perubahan Data, Data Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.